

KRITIS PENDIDIKAN ISLAM DI KAWASAN ASEAN

Sukari¹, Taufiq Khoirin², dan Ikhsan Nur Yahya³

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

* Corresponding Email: taufiqkhoirin321@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini membahas secara kritis perkembangan dan dinamika kebijakan Pendidikan Islam di kawasan ASEAN yang memiliki keragaman sosial, politik, dan budaya. Pendidikan Islam di negara-negara ASEAN berkembang melalui proses historis yang panjang, dipengaruhi oleh kolonialisme, modernisasi, serta tantangan global kontemporer seperti digitalisasi dan isu radikalisme. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah isu kebijakan yang krusial, antara lain modernisasi kurikulum, integrasi ilmu umum dan agama, problem dualisme pendidikan, kesenjangan teknologi dalam digitalisasi pembelajaran, serta problem politik identitas di wilayah masyarakat Muslim minoritas. Penelitian ini juga memetakan arah kebijakan masa depan pendidikan Islam yang menitikberatkan pada tiga fokus utama: modernisasi kurikulum, penguatan moderasi beragama, serta digitalisasi pendidikan. Ketiga fokus tersebut menjadi fondasi strategis bagi penguatan kualitas pendidikan Islam ASEAN agar lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Pendidikan Islam ASEAN, Kebijakan Pendidikan, Modernisasi Kurikulum, Moderasi Beragama, Digitalisasi Pembelajaran.

A B S T R A C T

This study critically examines the development and dynamics of Islamic education policies in the ASEAN region, which is characterized by significant social, political, and cultural diversity. Islamic education across ASEAN countries has evolved through a long historical process influenced by colonial legacies, modernization efforts, and contemporary global challenges such as digitalization and issues related to radicalism. The analysis in this study reveals several crucial policy issues, including curriculum modernization, the integration of religious and general sciences, the persistent dualism in educational systems, technological disparities in digital learning, and identity-based political challenges in minority Muslim communities. Furthermore, this study maps out the future policy directions of Islamic education, emphasizing three main priorities: curriculum modernization, the strengthening of religious moderation, and the advancement of educational digitalization. These priorities serve as a strategic foundation for enhancing the quality of Islamic education in ASEAN, ensuring that it becomes more adaptive, inclusive, and globally competitive.

Keywords: Islamic Education in ASEAN, Education Policy, Curriculum Modernization, Religious Moderation, Digital Learning.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai lebih dari 240 juta jiwa, kawasan ini menjadi salah satu poros penting perkembangan pendidikan

Islam dunia, terutama melalui peran negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Pendidikan Islam di kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, serta instrumen diplomasi sosial di tengah keragaman etnis dan agama (Rahman, 2020).

Perkembangan pendidikan Islam di ASEAN memiliki dinamika historis yang kuat. Indonesia dan Malaysia, misalnya, mengalami transformasi melalui modernisasi kurikulum dan integrasi ilmu umum dengan ilmu agama sejak abad ke-20. Sementara di kawasan minoritas Muslim seperti Thailand Selatan dan Filipina Selatan, pendidikan Islam berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi politik mayoritas dan menjadi bagian dari perjuangan identitas masyarakat Muslim setempat (Yusuf, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak berjalan dalam ruang kosong, tetapi terus dipengaruhi faktor politik, sosial, budaya, serta akses terhadap keadilan dan hak-hak sipil (Haron, 2018).

Di era kontemporer, muncul tantangan baru yang semakin kompleks. Globalisasi, digitalisasi, isu radikalisme, dan kompetisi ekonomi global mendorong lembaga pendidikan Islam untuk melakukan penyesuaian cepat agar tetap relevan. Tantangan tersebut melahirkan isu-isu kebijakan penting seperti modernisasi kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan moderasi beragama sebagai respon terhadap stigma radikalasi di beberapa wilayah ASEAN (Mahmud, 2019; Firdaus, 2021).

Selain itu, ketimpangan akses pendidikan, politik identitas, dan situasi keamanan turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam di wilayah minoritas Muslim seperti Myanmar, Thailand, dan Filipina. Kondisi ini membuat kebijakan pendidikan Islam di ASEAN bergerak secara tidak seragam, meninggalkan kesenjangan kualitas antarnegara (Karim, 2022).

Oleh sebab itu, kajian kritis terhadap kebijakan pendidikan Islam di ASEAN menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran objektif mengenai persoalan yang dihadapi, tetapi juga menawarkan arah kebijakan masa depan agar pendidikan Islam di kawasan ini semakin berdaya saing, adaptif, inklusif, dan relevan dengan perubahan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Seluruh proses penulisan dimulai dari penelusuran berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan isu-isu kebijakan Pendidikan Islam di kawasan ASEAN. Penulis menelaah jurnal-jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku kajian pendidikan, serta laporan kebijakan dari berbagai lembaga yang berfokus pada pendidikan Islam di Asia Tenggara.

Pendekatan ini dipilih karena problematik pendidikan Islam di ASEAN tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Melalui kajian literatur, penulis dapat memahami konteks historis, perkembangan kebijakan, serta perbandingan antarnegara secara lebih mendalam tanpa harus melakukan penelitian langsung ke lapangan.

Setiap sumber yang ditemukan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam tahap ini, penulis tidak hanya merangkum informasi, tetapi juga menginterpretasikan data berdasarkan pola, kecenderungan, dan isu-isu utama yang muncul di berbagai negara ASEAN. Misalnya, penulis membandingkan bagaimana Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei menerapkan kebijakan pendidikan Islam, lalu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan tantangan masing-masing.

Selain itu, analisis dilakukan dengan melihat keterkaitan antara kebijakan pendidikan, teknologi, politik identitas, serta moderasi beragama. Hal ini penting karena isu-isu tersebut saling memengaruhi dan menjadi kunci dalam memahami arah kebijakan pendidikan Islam di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Orientasi Pendidikan Islam di Kawasan ASEAN

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang menempatkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai dasar, tujuan, dan arah penyelenggaraan pendidikan. Secara konseptual, pendidikan Islam tidak hanya berbicara mengenai transfer pengetahuan agama, tetapi juga pembentukan kepribadian, etika sosial, dan transformasi budaya yang sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut Hasan (2019), pendidikan Islam di negara-negara Asia Tenggara berkembang dalam berbagai bentuk institusi seperti madrasah, sekolah Islam modern, pesantren di Indonesia, pondok di Malaysia, dan sekolah agama negara di Brunei, yang seluruhnya lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim untuk menciptakan identitas keagamaan yang kuat di tengah perubahan sosial modern.

Dalam konteks ASEAN, pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yaitu memadukan nilai-nilai Islam dengan lokalitas budaya Melayu-Nusantara. Ahmad (2018) menyebutkan bahwa konfigurasi pendidikan Islam di kawasan ASEAN selalu bergerak dalam tiga orientasi besar: (1) tradisi keilmuan Islam klasik, (2) tuntutan modernisasi pendidikan, dan (3) aspirasi pembentukan identitas kebangsaan. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam di kawasan ini lebih dinamis bila dibandingkan dengan kawasan Muslim lainnya karena selalu bernegosiasi dengan nilai-nilai budaya, politik, serta arus globalisasi.

Selain itu, ada aspek historis yang tidak dapat dipisahkan. Kolonialisme menjadi faktor penting dalam memengaruhi bentuk lembaga pendidikan Islam di ASEAN. Misalnya, sistem madrasah di Filipina Selatan (Bangsamoro) berkembang dari resistensi masyarakat Muslim terhadap dominasi pendidikan kolonial Amerika (Jamal, 2021). Sementara di Indonesia dan Malaysia, modernisasi madrasah dan pesantren mulai tampak sejak awal abad ke-20 sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda dan Inggris (Rahman, 2020). Dengan demikian, pendidikan Islam ASEAN merupakan hasil interaksi antara agama, budaya, politik, dan globalisasi, sehingga isu-isu kebijakan di dalamnya tidak pernah lepas dari dinamika multidimensional.

2.2 Isu-Isu Kebijakan dan Problematika Pendidikan Islam di ASEAN

Ada beberapa fokus pembahasan dalam penelitian ini yang mengurai tentang isu-isu kebijakan dan problematika Pendidikan Islam yang berada di kawasan ASEAN. Diantaranya adalah:

1. Modernisasi Kurikulum dan Ketimpangan Mutu Pendidikan Islam

Modernisasi kurikulum merupakan isu yang paling dominan di hampir seluruh negara ASEAN. Tantangannya ialah bagaimana lembaga pendidikan Islam mengintegrasikan kurikulum agama dan kurikulum umum tanpa menghilangkan karakter keislamannya. Siregar (2020) menjelaskan bahwa model dualisme kurikulum masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dualisme ini membuat pendidikan Islam dianggap hanya fokus pada aspek spiritual dan kurang memberikan kompetensi akademik yang dibutuhkan pada industri modern.

Di Indonesia, modernisasi kurikulum madrasah telah dilakukan melalui KMA No. 183/2019 dan KMA 184/2019. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kesenjangan mutu antar wilayah. Di pesantren, integrasi kurikulum modern sering bertabrakan dengan tradisi kitab kuning (Sutrisno, 2021). Di Malaysia, pemerintah berhasil menerapkan integrasi kurikulum melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang menggabungkan ilmu agama dan sains modern secara sistematis (Haron, 2018). Sedangkan di Thailand Selatan, sekolah Islam swasta masih kesulitan mengikuti standar kurikulum nasional karena keterbatasan pendanaan dan tekanan politik lokal (Yusuf, 2020).

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi kurikulum di ASEAN bersifat asinkron: beberapa negara mampu bergerak cepat, sedangkan lainnya tertinggal oleh faktor sosial-politik. Akibatnya, terdapat ketimpangan mutu pendidikan Islam antarnegara ASEAN yang hingga kini masih menjadi perhatian dalam berbagai forum pendidikan regional (Ahmad, 2022).

2. Radikalisme, Moderasi Beragama, dan Kebijakan Keamanan Pendidikan

Isu ini menjadi sorotan global beberapa tahun terakhir. Menurut Mahmud (2019), persepsi bahwa lembaga pendidikan Islam rentan dimasuki paham ekstremisme muncul karena terjadinya kasus-kasus radikalasi yang melibatkan individu berlatar pendidikan agama. Di Indonesia, pemerintah memperkuat kebijakan moderasi beragama melalui program Kementerian Agama, sementara di Malaysia diterapkan pendekatan Rahmatan lil 'Alamin (Firdaus, 2021).

Namun, pendekatan keamanan yang terlalu represif tanpa pemahaman konteks seringkali melanggar otonomi lembaga pendidikan. Di Thailand Selatan, misalnya, beberapa sekolah Islam berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan akibat konflik etnis-agama. Yusuf (2020) menyebutkan bahwa kebijakan ini justru menciptakan rasa tidak percaya antara sekolah dan pemerintah. Dengan demikian, tantangan ASEAN adalah bagaimana merumuskan kebijakan moderasi beragama yang tidak mengancam kemandirian lembaga pendidikan Islam, tetapi tetap efektif dalam mencegah radikalisme.

3. Digitalisasi Pendidikan Islam dan Kesenjangan Teknologi

Revolusi Industri 4.0 dan pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi pendidikan di seluruh ASEAN. Di banyak negara, lembaga pendidikan Islam menghadapi dua tantangan utama: kesiapan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Penelitian Rahman (2021) menunjukkan bahwa di pesantren Indonesia, pembelajaran daring menghadapi kendala jaringan, keterbatasan gawai, minimnya kompetensi guru dalam teknologi digital, dan kendala budaya pembelajaran kitab kuning yang berbasis tatap muka. Di Malaysia, digitalisasi lebih cepat karena didukung program Smart School yang telah berjalan sejak 2005 (Haron, 2018). Sementara di Brunei, integrasi teknologi digital dalam sekolah agama negara relatif merata, namun masih kurang pada pendidikan nonformal seperti pengajian kampung (Hakim, 2020).

Kesenjangan digital ini menciptakan digital divide antarnegara dan antarlembaga di ASEAN. Selain itu, belum ada standar kompetensi digital untuk guru pendidikan Islam secara regional. Padahal menurut Lestari (2023), transformasi digital sangat berpengaruh terhadap relevansi pendidikan Islam di era global, terutama dalam memproduksi pengetahuan keislaman yang kompatibel dengan kebutuhan masyarakat digital.

4. Politik Identitas, Minoritas Muslim, dan Tantangan Hak Pendidikan

Isu paling kritis terjadi di Thailand, Myanmar, dan Filipina. Di Thailand Selatan, Muslim Melayu Patani sering mengalami diskriminasi dalam kebijakan pendidikan nasional yang mengharuskan penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa utama pendidikan (Yusuf, 2020). Di Myanmar, komunitas Rohingya bahkan tidak memiliki akses pendidikan formal yang layak akibat kebijakan diskriminatif pemerintah militer (Karim, 2022). Di Filipina, konflik berkepanjangan di Mindanao menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan Islam (Jamal, 2021).

Isu politik identitas membuat pendidikan Islam berkaitan erat dengan konflik etnis dan hak-hak sipil. Ahmad (2022) menyebutkan bahwa pendidikan Islam di kawasan ASEAN tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan isu mayoritas-minoritas. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia relatif stabil karena Muslim menjadi mayoritas, sementara negara lain menghadapi tekanan politik terhadap komunitas Muslim minoritas.

2.3 Arah Kebijakan Masa Depan Pendidikan Islam ASEAN

Arah kebijakan pendidikan Islam di kawasan ASEAN ke depan bergerak pada tiga fokus utama yang saling berkaitan. *Pertama*, modernisasi dan integrasi kurikulum menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam mampu menjawab kebutuhan global. Modernisasi ini meliputi pembaruan materi keislaman, integrasi ilmu umum dengan ilmu agama, serta penguatan kompetensi abad 21 seperti literasi digital dan berpikir kritis. Lestari (2023) menegaskan bahwa tanpa pembaruan kurikulum, pendidikan Islam akan tertinggal dalam kompetisi global.

Kedua, terdapat upaya kuat dalam penguatan identitas keislaman moderat. Hal ini dilakukan untuk merespons berkembangnya isu ekstremisme dan menjaga harmoni

sosial di wilayah yang bersifat multikultural seperti ASEAN. Program moderasi beragama diperkuat melalui kurikulum akhlak, pelatihan guru, serta pembiasaan nilai-nilai toleransi. Ahmad (2022) menyebutkan bahwa moderasi Islam menjadi strategi diplomasi pendidikan regional untuk menjaga stabilitas dan citra positif Islam di Asia Tenggara.

Ketiga, kebijakan pendidikan Islam ASEAN semakin diarahkan pada digitalisasi dan inovasi pembelajaran. Transformasi digital pascapandemi mempercepat penggunaan platform daring, LMS, dan teknologi pembelajaran di pesantren maupun madrasah. Lestari (2023) menekankan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sejalan dengan tiga arah kebijakan tersebut, beberapa ahli mengusulkan kebutuhan pembentukan kerangka kerja sama regional untuk memperkuat harmonisasi standar pendidikan Islam di ASEAN. Lestari (2023) dan Ahmad (2022) menyarankan pembentukan badan seperti ASEAN Islamic Education Council yang dapat mengatur standardisasi kurikulum, akreditasi lembaga Islam, mobilitas akademik, hingga riset bersama. Hingga saat ini, lembaga tersebut belum terbentuk, sehingga kerja sama masih bersifat bilateral dan belum terkoordinasi secara regional.

Secara keseluruhan, masa depan pendidikan Islam ASEAN akan ditentukan oleh keberhasilan negara-negara anggotanya dalam memadukan modernisasi, moderasi, dan digitalisasi secara terpadu untuk menghasilkan sistem pendidikan Islam yang relevan, inklusif, dan berdaya saing global.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian teori dan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di kawasan ASEAN merupakan sebuah sistem yang hidup dan terus berkembang, dibentuk oleh sejarah panjang interaksi antara nilai-nilai keagamaan, dinamika sosial-politik, dan tantangan global. Setiap negara memiliki pola perkembangan yang berbeda, namun semuanya menunjukkan bahwa pendidikan Islam memegang peran penting dalam pembentukan identitas keagamaan dan sosial masyarakat.

Isu-isu kebijakan yang muncul—mulai dari modernisasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, hingga persoalan politik identitas—menjadi gambaran bahwa pendidikan Islam di ASEAN berada pada titik persimpangan penting. Lembaga pendidikan Islam dituntut tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga bertransformasi agar mampu menjawab kebutuhan zaman.

Arah masa depan pendidikan Islam di ASEAN bergerak menuju modernisasi yang lebih integratif, penguatan moderasi beragama sebagai pondasi harmoni sosial, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran. Ketiganya bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pendidikan Islam mampu tampil sebagai kekuatan strategis yang membangun, bukan hanya pada level nasional tetapi juga regional.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi pendidikan Islam di ASEAN sangat bergantung pada kolaborasi regional, keberanian mengadopsi inovasi, dan komitmen menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif. Dengan langkah yang tepat,

pendidikan Islam berpotensi besar menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat ASEAN yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2018). Islamic education in Southeast Asia: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Studies*, 29(3), 287–305.
- Ahmad, F. (2022). ASEAN collaboration on Islamic education standards: Opportunities and challenges. *Asia Pacific Education Review*, 23(4), 621–634.
- Firdaus, M. (2021). Moderasi beragama dan konstruksi pendidikan Islam di Malaysia. *Malaysian Journal of Islamic Studies*, 9(2), 45–60.
- Hakim, R. (2020). Digital learning implementation in Brunei Darussalam Islamic schools. *Brunei Education Review*, 12(1), 14–28.
- Haron, S. (2018). The integrated curriculum in Malaysian Islamic schools: Reform and realities. *International Journal of Islamic Education*, 7(2), 112–130.
- Hasan, N. (2019). Trends of Islamic education in ASEAN countries: A comparative perspective. *Asian Education and Development Studies*, 8(2), 134–150.
- Jamal, K. (2021). Madrasah development in the Bangsamoro Autonomous Region: Policy and practice. *Philippine Journal of Education Studies*, 95(1), 56–72.
- Karim, A. (2022). Rohingya minority and the right to education: A human rights analysis. *Human Rights and Education Journal*, 11(3), 201–218.
- Lestari, D. (2023). Digital literacy and Islamic education in Southeast Asia: Challenges and future directions. *Journal of Islamic Pedagogy*, 5(1), 77–94.
- Mahmud, H. (2019). Counter-radicalization policies in Southeast Asian Islamic schools. *Southeast Asian Studies Review*, 27(1), 89–108.
- Rahman, A. (2020). Historical development of Islamic education in Indonesia: Tradition and transformation. *Indonesian Journal of Islamic History*, 4(1), 1–18.
- Rahman, A. (2021). Pesantren and online learning challenges during COVID-19. *Journal of Islamic Education Technology*, 3(2), 44–59.
- Siregar, M. (2020). Dualism in the Islamic education curriculum in Indonesia. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 10(2), 66–82.
- Sutrisno, A. (2021). Integration of *kitab kuning* and modern curriculum in Indonesian pesantren. *Pesantren Studies Journal*, 6(1), 33–48.
- Yusuf, M. (2020). Islamic education and identity in Southern Thailand. *Thai Muslim Academic Review*, 15(1), 21–40.